

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1.Kajian Teori

##### 2.1.1. Agency Theory

Anthony dan Govindarajan (2009) mengemukakan konsep *agency theory* sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* (dalam hal ini investor) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan pada *agent* (yang dalam hal ini manajemen) untuk melakukan tugas tertentu yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Asumsi *agency theory* adalah bahwa masing-masing individu adalah *economic rational man* dan kontrak antara *principal* dan *agent* tersebut dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Principal* termotivasi untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara *principal* dan *agent* memacu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan dapat lebih memaksimalkan kepentingannya. Cara yang dapat dilakukan *agent* untuk mempengaruhi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka-angka akuntansi tersebut dapat berupa rekayasa laba atau manajemen laba dalam laporan keuangan. Oleh karena laporan keuangan sering digunakan sebagai indikator penilaian kinerja, maka perilaku manajer laba dimungkinkan dapat terjadi karena manajer mempunyai informasi lebih banyak dan lebih akurat daripada *principal*. Beberapa tujuan manajer melakukan manajemen laba, menurut Bauman dkk. (2001) adalah : menghindari rugi, menghindari penurunan laba, *avoiding failing meet or beat analyst forecast*, dan *invoke an earning big bath*.

#### 2.1.2. Teori Akuntansi Positif

Teori ini mengakui adanya tiga hubungan keagenan Watt dan menuut Zimmerman dalam Widyaningsih dan Purnamawati (2012), diantaranya yaitu:

##### 1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

## 3. *The Political Cost Hypothesis*

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2. Tinjauan Literatur

### 2.2.1. Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi secara umum menurut Warren dkk (2005) adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Selanjutnya pengertian akuntansi menurut Suhayati (2009) dalam buku akuntansi keuangan merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. (Bagian ini menerangkan tentang kegiatan ekonomi). Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan yang bersangkutan. (Segi kegunaan dari akuntansi)".

### 2.2.2. Konsep Perpajakan

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2011). Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Smeets dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2010). Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan,
- 2) Fungsi Mengatur (*Regularend*) artinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.2.3. Manajemen Laba

Pada dasarnya, definisi dari manajemen laba (*earning management*) menurut Belkaoui (2007) adalah perilaku yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Selanjutnya definisi manajemen laba menurut Djamaluddin (2008) adalah perilaku yang dilakukan manajer menggunakan kebijakan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Selanjutnya Scott (2012) juga menjelaskan manajemen laba merupakan cara yang digunakan manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara pemilihan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara ilmiah dapat memaksimumkan laba yang diperoleh.

Pada satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya. Namun demikian, di sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan untuk meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak (Ettredge et al., 2008).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi di atas, pengertian manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka-angka akuntansi yang dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya.

Berikut beberapa model Pengukuran manajemen laba (*Earnings Management*) :

#### 1. *Model Healy*

Healy Model (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual di seluruh variabel pembagian manajemen laba. Studi Healy berbeda dengan kebanyakan studi manajemen laba lainnya karena ia memprediksi bahwa manajemen laba sistematis terjadi dalam setiap periode. Variabel pemisahnya membagi sampel menjadi tiga kelompok, dengan pendapatan diprediksi akan dikelola ke atas di salah satu kelompok dan ke bawah pada dua kelompok lainnya. Kesimpulan kemudian dilakukan melalui perbandingan berpasangan dari total akrual rata-rata pada kelompok di mana pendapatan diperkirakan akan dikelola ke atas dengan rata-rata total akrual untuk masing-masing kelompok di mana pendapatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diprediksi akan dikelola ke bawah. Pendekatan ini setara dengan memperlakukan seperangkat pengamatan dimana pendapatan diperkirakan akan dikelola ke atas sebagai periode estimasi dan himpunan pengamatan dimana pendapatan diperkirakan akan dikelola ke bawah sebagai periode peristiwa. Total akrual rata-rata dari periode estimasi kemudian mewakili ukuran akrual nondiscretionary. Total accruals (ACC<sub>t</sub>) yang mencakup discretionary (DA<sub>t</sub>) dan non-discretionary (NDA<sub>t</sub>) components, dihitung sebagai berikut (Healy, 1985):

$$ACC_t = NA_t + DA_t ,$$

Selanjutnya total akrual diestimasi dengan menghitung selisih antara laba akuntansi yang dilaporkan dikurangi dengan arus kas operasi. Arus kas merupakan modal kerja dari aktivitas operasi dikurangi dengan perubahan-perubahan dalam persediaan dan piutang usaha, di tambah dengan perubahan-perubahan pada persediaan dan utang pajak penghasilan. Sehingga formula selengkapny menjadi sebagai berikut (Healy, 1985):

$$ACC_t = -DEP_t - (XIt \times DI) + \Delta AR_t + \Delta INV_t - \Delta AP_t - \{(\Delta TP_t + Dt) \times D2\}$$



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Keterangan:

- $DEPt$  = Depresiasi di tahun  $t$   
 $XIt$  = Extraordinary Items di tahun  $t$   
 $\Delta AR t$  = Piutang usaha di tahun  $t$  dikurangi piutang usaha di tahun  $t-1$   
 $\Delta INVt$  = Persediaan di tahun  $t$  dikurangi persediaan di tahun  $t-1$   
 $\Delta APt$  = Utang usaha di tahun  $t$  dikurangi utang usaha di tahun  $t-1$   
 $\Delta TPt$  = Utang pajak penghasilan di tahun  $t$  dikurangi utang pajak penghasilan di tahun  $t-1$   
 $D1$  = 1 jika rencana bonus dihitung dari laba setelah extraordinary items, 0 jika rencana bonus dihitung dari laba sebelum extraordinary items;  
 $D2$  = 1 jika rencana bonus dihitung dari laba sesudah pajak penghasilan, 0 jika rencana bonus dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan,

#### 2. Model Jones

Jones (1991) mengusulkan sebuah model yang menyederhanakan anggapan bahwa akrual nondiskretioner bersifat konstan. Modelnya mencoba mengendalikan efek perubahan pada lingkungan ekonomi perusahaan terhadap akrual nondiskretioner. Model Jones untuk akrual

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nondiskretioner pada tahun yang bersangkutan adalah (Jones, 1991):

$$NDA_t = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t) + \alpha_3 (PPE_t)$$

Keterangan:

- $\Delta REV_t$  = pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 dibagi dengan Total aset pada t-1;
- $PPE_t$  = property, pabrik dan peralatan pada tahun t dibagi dengan total aset pada t-1;
- $A_{t-1}$  = total aset pada tahun t-1;
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  = parameter-parameter spesifik perusahaan.

Estimasi parameter spesifik perusahaan ( $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ) dihasilkan dengan menggunakan model berikut pada periode estimasi (Jones, 1991):

$$TA_t = a_1 (1 / A_{t-1}) + a_2 (\Delta REV_t) + a_3 (PPE_t) + v_t,$$

Dimana:

$a_1, a_2, \text{ dan } a_3$  = estimasi koefisien regresi dari  $\alpha_1, \alpha_2, \text{ dan } \alpha_3$ .

$TA$  = total akrual dibagi dengan total aset tahun t-1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dechow et al. (1995) menjelaskan bahwa hasil perhitungan Model Jones menunjukkan bahwa model tersebut berhasil menjelaskan sekitar seperempat variasi total akrual. Asumsi yang tersirat dalam model Jones adalah bahwa pendapatan bukan diskresioner. Jika pendapatan dikelola melalui pendapatan discretionary, maka Model Jones akan menghapus sebagian dari pendapatan yang dikelola dari proxy akrual diskresioner. Misalnya, pertimbangkan situasi dimana manajemen menggunakan kebijaksanaannya untuk memperoleh pendapatan pada akhir tahun saat uang belum diterima dan sangat dipertanyakan apakah pendapatan tersebut telah diperoleh. Hasil dari pertimbangan manajerial ini akan meningkatkan pendapatan dan jumlah akrual (melalui peningkatan piutang). Model Jones menterjemahkan total akrual yang berhubungan dengan pendapatan dan oleh karena itu akan mengekstrak komponen akrual diskresioner ini, yang menyebabkan estimasi manajemen laba menjadi bias terhadap nol. Jones mengakui keterbatasan model ini di dalam tulisannya (Dechow et al., 1995).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. *Model Modifikasi Jones*

Dechow et al. (1995) mempertimbangkan versi modifikasi Model Jones dalam analisis empiris. Modifikasi ini dirancang untuk menghilangkan kemungkinan dugaan Model Jones untuk mengukur akrual diskresioner dengan kesalahan ketika diskresi manajemen dilakukan terhadap pendapatan. Dalam model yang dimodifikasi, akrual nondiskretioner diperkirakan selama periode peristiwa (yaitu, selama periode di mana manajemen laba dihipotesakan. Penyesuaian yang dilakukan terhadap Model Jones asli adalah bahwa perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang pada periode kejadian. Model Jones asli secara implisit mengasumsikan bahwa diskresi tidak dilakukan terhadap pendapatan baik dalam periode estimasi atau periode peristiwa. Versi Modifikasi Model Jones secara implisit mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam penjualan kredit pada periode kejadian berasal dari manajemen laba, hal ini didasarkan pada penalaran bahwa lebih mudah mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan pendapatan atas penjualan kredit daripada mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan atas penjualan tunai (Dechow et al., 1995). Jika modifikasi ini berhasil, maka perkiraan manajemen laba seharusnya tidak lagi bias terhadap nol dalam sampel dimana manajemen laba telah dilakukan melalui pengelolaan pendapatan.

Formula selengkapnya dari Model John yang Dimodifikasi adalah sebagai berikut (Dechow et al., 1995):

- 1) menghitung total accrual (TAC) yaitu laba bersih tahun  $t$  dikurangi arus kas operasi tahun  $t$  dengan rumus sebagai berikut:

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya, *total accrual* (TA) diestimasi dengan Ordinary Least Square sebagai berikut:

$$TA_{it} = \beta_1(1A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it} / A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon$$

- 2) Dengan koefisien regresi seperti pada rumus di atas, maka *nondiscretionary accruals* (NDA) ditentukan dengan formula sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$NDA_{it} = \beta_1(1A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it}A_{it-1} - \Delta Rec_{it}A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}A_{it-1})$$

- 3) Terakhir, *discretionary accruals* (DA) sebagai ukuran manajemen laba ditentukan dengan formula berikut :

$$DA_{it} = TA_{it}A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan :

$DA_{it}$  = *Discretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

$NDA_{it}$  = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

$TA_{it}$  = Total acrual perusahaan i dalam periode tahun t

$NI_{it}$  = Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t

$CFO_{it}$  = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t

$A_{it-1}$  = total assets perusahaan i dalam periode tahun t-1

$\Delta Rev_{it}$  = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan pendapatan perusahaan I pada tahun t-1

$PPE_{it}$  = property, pabrik, dan peralatan perusahaan i dalam periode tahun t

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$\Delta \text{Recit}$  = piutang usaha perusahaan I pada tahun t dikurangi pendapatan perusahaan I pada tahun t-1.

$\varepsilon$  = error

#### 4. Model pendekatan distribusi (*Philips et al.*, 2003)

Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba pada suatu perusahaan adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasi batas pelaporan laba (*earnings thresholds*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings thresholds* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Philips *et al.* (2003) menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan pendekatan distribusi laba dikarenakan manajer sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank, dan *supplier* menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer. Philips *et al.* (2003) menyatakan bahwa terdapat dua macam *earnings thresholds*, yaitu:

- 1) Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Philips *et al.* (2003) menggunakan pendekatan ini dengan membandingkan antara tahun perusahaan yang memiliki tingkat laba berskala nol atau positif dengan sampel tahun perusahaan yang memiliki laba negatif. Hasil penelitian Philips *et al.* (2003) menyatakan bahwa peningkatan dalam beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari pelaporan kerugian.

- 2) Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Philips *et al.* (2003) menggunakan titik perubahan nol untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba. Adanya upaya praktik manajemen laba dilakukan dengan membandingkan perusahaan yang perubahan labanya negatif. Philips *et al.* (2003) menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa beban pajak tangguhan berguna dalam memprediksi manajemen laba.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumus pendekatan distribusi laba yaitu (Philips *et al.*, 2003):

$$SEC = \frac{\{NI_{(it)} - NI_{i(t-1)}\}}{MVE_{(t-i)}}$$

Keterangan:

<i>SEC</i>	= perubahan laba
<i>NI</i>	= laba perusahaan i pada tahun t.
<i>NI(t-1)</i>	= laba perusahaan i pada tahun t-1.
<i>MVE(t-1)</i>	= <i>Market Value of Equity</i> perusahaan i pada tahun t-1.

#### 2.2.4. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Zain (2007), Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, yang bertujuan untuk mengefesiensi jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya menurut Pohan (2013), perencanaan pajak adalah suatu upaya agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Selain itu, Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengelolaan kewajiban perpajakan sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dilakukan secara legal yang dapat diterima oleh aparat perajakan.

### 1) Tujuan Perencanaan Pajak

- a. Meminimalisir beban pajak yang terutang, tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - a) Memaksimumkan Laba setelah pajak;
  - b) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus;
  - c) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisiensi dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrative maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, hukuman kurung atau penjara;
- c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak ( PPh pasal 21, pasal 22 dan Pasal 23 ).

**2) Strategi Dalam Perencanaan Pajak**

Beberapa strategi dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

- a. *Tax Saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- b. *Tax Avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.
- e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka.

**3) Manfaat perencanaan pajak**

- a. Penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya dari perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas (*cash flow*). Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

**2.2.5. Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46)**

Dalam akuntansi pajak penghasilan (PPh), laba dibedakan antara laba akuntansi (*accounting profit*), laba komersial dengan laba fiskal (*taxable profit*), atau Penghasilan Kena Pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurang beban pajak yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan lebih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi, sedangkan laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan atau lebih ditujukan untuk menjadi dasar perhitungan PPh (IAI, 2004).

#### 2.2.6. Beda Waktu atau Sementara

Beda waktu artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi beda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual, realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan aset atau beban pajak tangguhan, sementara beda tetap tidak.

#### 2.2.7. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan menurut Waluyo (2008) adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang pajak.

Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya aset pajak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan *judgment* untuk menaksir seberapa mungkin aset pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan.

Menurut Agoes (2007), Aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Selanjutnya Jones Sally M dan Rhoades Chatanach Shelley dalam Zain (2007), mengungkapkan bahwa aset pajak tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar pajak, yang akan diganti dimasa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer.

#### 2.2.8. Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)

Menurut Agoes (2007), Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan. Dimana kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beban pajak menurut peraturan perpajakan .kewajiban pajak tangguhan adalah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Dalam Zain (2007), Jones Sally M dan Rhoades Chatanach Shelley mengungkapkan bahwa kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan seperti kurang bayar pajak, yang akan dibayar dimasa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer.

Selanjutnya menurut Harnanto (2003), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).Perbedaan antar laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak (Yulianti, 2004).

Efek perubahan perbedaan temporer yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) atau penghasilan pajak tangguhan (*deferred tax income*), dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini (*current tax expenses*), dengan penyajian secara terpisah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.9. Basis Akrua

Menurut Muljono (2009), akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang. selanjutnya menurut Elingga (2008), teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekuitas.

Akrual tidak tergantung kapan penghasilan diterima dan kapan biaya dilunasi. Dengan pendekatan ini, mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan mengakui beban pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan dan pembayaran kas.

Dasar akrual umumnya memberikan indikasi yang lebih baik dalam laporan keuangan karena transaksi dan peristiwa keuangan diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (IAI 2013). Namun konsep akrual tersebut memiliki kelemahan yaitu dapat dimanfaatkan untuk rekayasa angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga dapat digunakan untuk mengubah angka laba yang dihasilkan apabila standar akuntansi memungkinkan. Akrual yang menjadi dasar pengukuran transaksi akuntansi dapat dibedakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi 2 (dua) yaitu: *non discretionary accrual* (akrual tidak bebas), dan *discretionary accrual* (akrual bebas).

#### 2.2.10. Perspektif Islam Berkaitan Dengan Pajak

Bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits secara jelas maka kita tidak akan menemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nas tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan adil dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قُلَى  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قُلَى وَعَلَّمُوا أَنَّ  
اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. {البقرة: 267}

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*” (QS. Al-Baqarah: 267).

Kemudian dikenal juga jenis pajak dengan sebutan *jizyah*. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Pada masa Rasulullah saw., besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid.

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
صَاغِرُونَ. {التَّوْبَةُ: 29}

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.* (QS. At- Taubah: 29)

Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.

#### 2.2.11. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

N O	JUDUL PENELITIAN	PENULIS/ TAHUN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	A.A Gede Raka Plasa Negara dan I.D.G. Dharma Suputra /2017	<b>Variabel independen:</b> 1)Pengaruh Perencanaan Pajak ( $X_1$ ) 2)Beban Pajak Tangguhan ( $X_2$ )  <b>Variabel dependen:</b>	Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Manajemen laba (Y <sub>1</sub> )	melakukan manajemen laba.
2	Pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bea tahun 2011-2013)	Lucy Citra Fitriany/ 2016	<b>Variabel independen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aset pajak tangguhan (X<sub>1</sub>)</li> <li>2) beban pajak tangguhan (X<sub>2</sub>)</li> <li>3) perencanaan pajak (X<sub>3</sub>)</li> </ol> <b>Variabel dependen:</b> manajemen laba (Y <sub>1</sub> )	Aset pajak tangguhan dan Perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Manajemen laba. Sedangkan beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.
3	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Asimetri Informasi, Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Earnings Management</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Esti Mustika Sari/ 2016	<b>Variabel independen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aset Pajak Tangguhan (X<sub>1</sub>)</li> <li>2) Beban Pajak Tangguhan (X<sub>2</sub>)</li> <li>3) Perencanaan Pajak (X<sub>3</sub>)</li> <li>4) Asimetri Informasi (X<sub>4</sub>)</li> <li>5) <i>Leverage</i> (X<sub>5</sub>)</li> </ol> <b>Variabel dependen:</b> <i>Earnings Management</i> (Y)	Aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, asimetri informasi dan <i>leverage</i> , hanya variabel <i>leverage</i> yang memiliki tingkat signifikansi 0,033 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>earnings management</i>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Indonesia Tahun 2010-2014)			
4	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Ratna Eka Puji Astutik/ 2016	<b>Variabel independen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan Pajak (<math>X_1</math>)</li> <li>2) Beban Pajak Tangguhan (<math>X_2</math>)</li> </ol> <b>Variabel dependen:</b> manajemen laba ( $Y_1$ )	perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan masing-masing mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman.
5	Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, Dan Basis Akrua Terhadap Manajemen Laba	Felicia Amanda & Meiriska Febrianti/ 2015	<b>Variabel independen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Beban Pajak Kini (<math>X_1</math>)</li> <li>2) Beban Pajak Tangguhan (<math>X_2</math>)</li> <li>3) Basis Akrua (<math>X_3</math>)</li> </ol> <b>Variabel dependen:</b> Manajemen Laba ( $Y$ )	Beban pajak kini, beban pajak tangguhan, dan basis Akrua secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
6	Analisis beban pajak tangguhan, aktiva pajak tangguhan, dan akrual sebagai prediktor manajemen laba pada	Agung Nurmansyah/ 2014	<b>Variabel independen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) beban pajak tangguhan (<math>X_1</math>)</li> <li>2) aktiva pajak tangguhan (<math>X_2</math>)</li> <li>3) akrual (<math>X_3</math>)</li> </ol> <b>Variabel</b>	Beban pajak tangguhan dan akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan aktiva pajak tangguhan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2013		<b>dependen:</b> manajemen laba ( $Y_1$ )	tidak berpengaruh signifikan.
7	Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba Pada perusahaan nonmanufaktur Yang terdaftar di BEI	Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih/ 2012	<b>Variabel independen:</b> perencanaan pajak ( $X_1$ ) <b>Variabel dependen:</b> manajemen laba ( $Y_1$ )	Perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI.
8	Pengaruh aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan akrual terhadap <i>earning management</i> (studi empiris pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia)	Dewi Pindiharti/ 2011	<b>Variabel independen:</b> 1) aktiva pajak tangguhan ( $X_1$ ) 2) beban pajak tangguhan ( $X_2$ ) 3) akrual ( $X_3$ ) <b>Variabel dependen:</b> manajemen laba ( $Y_1$ )	Beban pajak tangguhan dan akrual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan praktik manajemen laba sedangkan aktiva pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan.

a  
hun 2018 dari berbagai referensi)

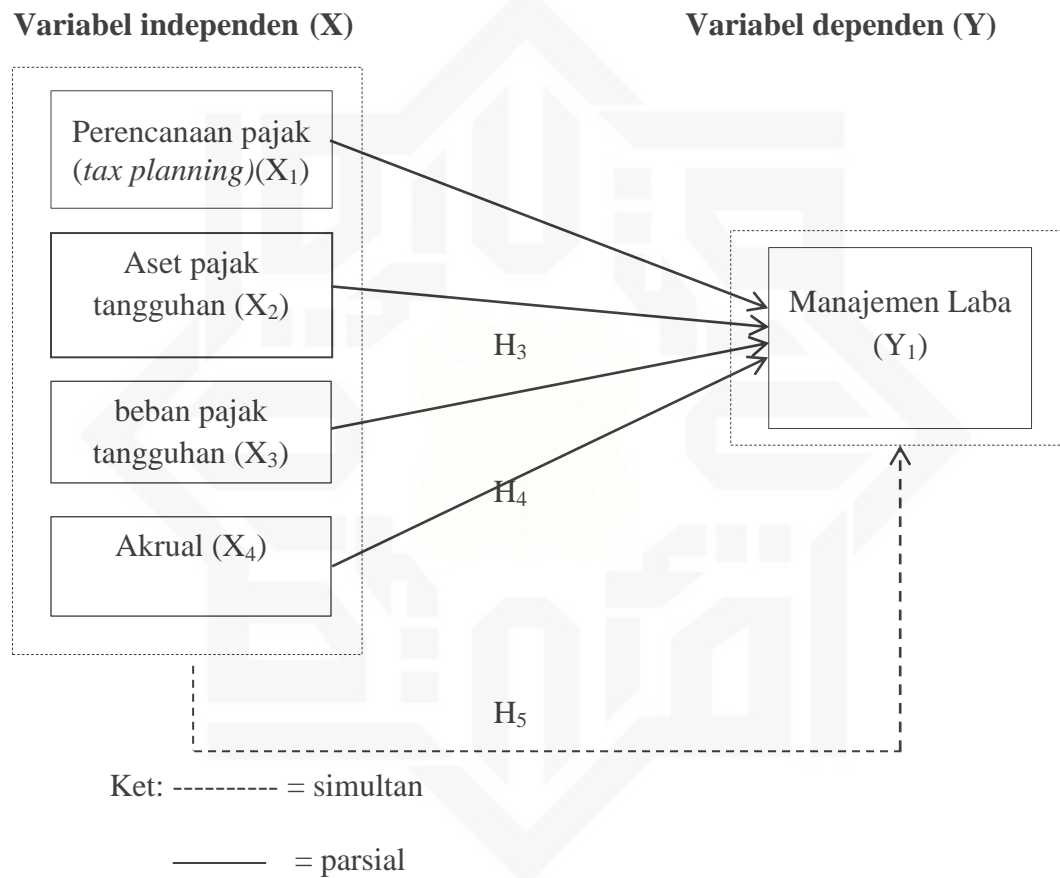


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2.12. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir



(sumber: data yang diolah tahun 2018)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.13. Pengembangan Hipotesis

#### a. Pengaruh Perencanaan Pajak (*tax planning*) terhadap Manajemen Laba

Pohan (2013) mengatakan bahwa perencanaan pajak adalah suatu upaya agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perencanaan pajak juga pernah dilakukan oleh Sumomba dan Hutomo (2012) yang juga meneliti apakah perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dan ditemukan bukti bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Dan penelitian yang dilakukan Raka (2017) menemukan bahwa Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen laba karena perencanaan pajak dapat menurunkan suatu tingkat laba dalam perusahaan.

Maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>** :Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.

#### b. Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Menurut PSAK 46 (2012), Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebab adanya akibat dari perbedaan temporer dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan yang mengijinkan.

Oleh karena itu dibutuhkan *judgment* untuk menaksir seberapa mungkin aset pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan. Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi pengguna laporan keuangan. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan (Suranggane, 2007).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian Suranggane (2007) bahwa aset pajak tangguhan dijadikan proksi sebagai indikator dari praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan adanya peranan antara aset pajak tangguhan yang dapat dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba. Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*), untuk itu dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>** : Aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.

**c. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba**

Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti financial distress dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau manajemen laba dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba/rugi. Selisih negative antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya beban pajak tangguhan (Djamalludin, 2008).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan beban pajak tangguhan juga pernah dilakukan oleh Pindiharti (2011) yang menjelaskan bahwa Beban pajak tangguhan dan akrual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan praktik manajemen laba.

Dapat disimpulkan bahwa suatu beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba, maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut

**H<sub>3</sub>** :Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

#### d. Pengaruh Basis Akrual terhadap Manajemen Laba

Menurut Muljono (2009), akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang.

Penelitian terdahulu tentang basis akrual juga pernah dilakukan oleh Amanda (2015) yang menemukan bahwa basis akrual secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penyusunan laporan keuangan yang menggunakan metode akrual digunakan oleh para manajer dengan memanipulasi data sedemikian rupa untuk mempengaruhi keputusan *stakeholder*. Oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, ada kecenderungan para menejer untuk mengatur laba sedemikian rupa dengan menerapkan *income-increasing discretionary accruals* (artinya usaha untuk merekayasa laba dengan menurunkan tingkat laba pada tingkat tertentu untuk membalikkan kebijakan akrual yang dilakukan sebelumnya) (Elingga, 2008).

Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan adanya peranan akrual yang digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>** :Basis akrual berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

**e. Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Akrual Terhadap Manajemen Laba**

Perencanaan pajak memiliki pengaruh, yakni semakin bagus perencanaan pajak maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. Selain itu, peran perencanaan pajak juga berpengaruh terhadap praktik manajemen laba untuk

meminimalkan beban PPh, apalagi dengan adanya perubahan peraturan perpajakan yang salah satu peraturannya mengenai penurunan tarif pajak tunggal. Hal tersebut lebih memotivasi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin dengan melakukan manajemen laba.

Selain itu, Aset pajak tangguhan juga terjadi apabila laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih besarnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang. Berdasarkan penelitian Suranggane (2007) bahwa aset pajak tangguhan dijadikan proksi sebagai indikator dari praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan adanya peranan antara aset pajak tangguhan yang dapat dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

Beban pajak tangguhan berpengaruh secara positif terhadap praktik manajemen laba, di mana dalam hal ini beban pajak tangguhan mampu mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Penyusunan laporan keuangan yang menggunakan metode akrual digunakan oleh para menejer dengan memanipulasi data

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian rupa untuk mempengaruhi keputusan *stakeholder*. Oleh karena itu, ada kecenderungan para menejer untuk mengatur laba sedemikian rupa dengan menerapkan *income-increasing discretionary accruals* (artinya usaha untuk merekayasa laba dengan menurunkan tingkat laba pada tingkat tertentu untuk membalikkan kebijakan akrual yang dilakukan sebelumnya) (Elingga, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena perencanaan pajak dapat menurunkan suatu tingkat laba dalam perusahaan, Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*), suatu beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena beban pajak tangguhan dapat menurunkan suatu tingkat laba dalam perusahaan, dan akrual dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba, maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut :

**H<sub>5</sub>** :Perencanaan pajak (*tax planning*), aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan basisi akrual berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.